

Peningkatan Kerja Sama Militer Filipina dengan AS sebagai Tindakan Rasional Marcos Jr.

Ebenezer Sondang Simanjuntak¹

Email Koresponden: ebenezersmnjtk@students.amikom.ac.id

Abstract

This research delves into the factors driving the renewed security collaboration, between the Philippines and the U.S in the Marcos Jr's era. The writer sheds light on aspects regarding what shapes the foreign and security strategies of the Philippines. The research uses qualitative method and rational actor model theory. Upon analyzing the data gathered it was found that Marcos Jr. has chosen to enhance collaboration with the U.S. as the advantageous option with few expenses except for potential short term tensions, with China. This choice seeks to enhance the Philippines' standing in the area and enhance the country's importance within the context dynamics. Marcos Jr.' approach is, in line with the benefits specifically related to security.

Keywords: *Philippines-US; enhance security relations; rational actor model*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis alasan menguatnya kembali kerja sama keamanan Filipina dan AS di era Marcos Jr. Penulis mengisi kesenjangan dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri dan keamanan Filipina yang terus berubah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori pilihan rasional. Hasilnya, setelah melakukan analisis rasional, Marcos Jr. memilih untuk meningkatkan kerja sama militer dengan AS sebagai opsi yang paling menguntungkan dan sangat minim cost, yaitu potensi peningkatan ketegangan jangka pendek dengan Cina. Opsi ini bertujuan memperkuat posisi Filipina di kawasan, dan meningkatkan nilai strategis negara dalam dinamika regional. Hal yang dilakukan Marcos Jr. sejalan dengan kepentingan nasional yaitu keamanan nasional.

Kata kunci: *Filipina-AS; model aktor rasional; peningkatan kerja sama keamanan*

Pendahuluan

Hubungan pertahanan antara Filipina dan AS telah terjalin sejak zaman Perang Dunia II. Setelah perang berakhir, keduanya sepakat untuk menandatangani beberapa perjanjian penting seperti *Philippine-American Military Bases Agreement (MBA)* dan *Mutual Defense Treaty (MDT)* pada tahun 1951 (Advincula-lopez, 2022). Aliansi kedua negara mengalami dinamika sehingga masih banyak terjadi pertentangan. Pertentangan tersebut tergantung dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri presiden

yang menjabat. Sebagai contoh pada tahun 2016, dimana Barack Obama masih menjabat sebagai presiden AS. Sementara itu Filipina mengadakan pergantian presiden dan yang terpilih adalah presiden Rodrigo Duterte. Pandangan aktor negara ini sangat berbeda dari presiden sebelumnya, Benigno Aquino III, yaitu tidak ingin intervensi dari AS dan tidak ingin dekat dengan AS (Setiawan et al., 2021).

Duterte meluncurkan kampanye *war on drugs* pada tahun 2016. Kebijakan ini ditujukan untuk memberantas peredaran

¹ Prodi Hubungan Internasional, Universitas AMIKOM Yogyakarta

narkoba di Filipina dengan cara yang keras dan tegas, termasuk dengan memberikan izin kepada aparat keamanan untuk menembak mati para pengedar narkoba. Kebijakan *war on drugs* Duterte menuai kontroversi karena dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama terkait dengan tindakan eksekusi tanpa proses hukum yang adil terhadap para pengguna dan pengedar narkoba. Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, penangkapan sewenang-wenang, dan eksekusi tanpa pengadilan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Reaksi AS terhadap kebijakan *war on drugs* Duterte juga tidak mendukung, dimana beberapa pejabat AS mengkritik keras pendekatan kekerasan yang diambil oleh pemerintah Filipina. Hal ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan antara Filipina dan AS, terutama dalam hal penegakan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Meskipun pada akhirnya kebijakan *war on drugs* ini berhasil menurunkan tingkat kejahatan di Filipina, namun dampak kontroversialnya terhadap hak asasi manusia dan hubungan keamanan dengan negara lain, terutama AS, itu jelas ada yaitu memudar atau menurun.

Setelah menurunnya kerja sama Filipina dan AS selama kepemimpinan Duterte, Marcos Jr., yang menjabat sebagai Presiden Filipina untuk periode 2022-2027, mengambil alih pemerintahan. Marcos Jr. diharapkan membawa perubahan dalam kebijakan luar negeri Filipina, termasuk hubungan keamanannya dengan AS. Penulis melihat adanya peningkatan hubungan keamanan antara kedua negara ini, dimana pada pertemuan *11th Philippines-United States Bilateral Strategic Dialogue (BSD)*, Filipina dan AS menegaskan kembali tentang pentingnya aliansi keamanan dan komitmen bersama di bawah *Mutual Defense Treaty*. Kemudian, kedua negara tersebut sepakat untuk meningkatkan komunikasi aliansi,

memperluas operasi bersama di domain maritim, dan mempercepat pengembangan kemampuan militer. Hal ini terlihat dari kesepakatan untuk menambahkan lokasi dalam EDCA, dengan investasi dari AS senilai \$128 juta. Bahkan, kedua negara juga berkomitmen untuk memperkuat keamanan maritim, dan memperdalam kolaborasi di bidang pertahanan dalam menghadapi tantangan keamanan (U.S. EMBASSY IN THE PHILIPPINES, 2024).

Penulis memandang ada perbedaan kebijakan luar negeri ke AS antara Duterte dan Marcos Jr. Duterte ingin menurunkan hubungan dengan AS dengan beralih ke Cina, sementara Marcos Jr. ingin memperkuat hubungan dengan AS. Sehingga, penulis ingin menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tindakan Marcos Jr. untuk memperkuat hubungan keamanannya dengan AS setelah sempat menurun di era Duterte. Penelitian ini menjadi penting karena menganalisis strategi negara berkembang seperti Filipina dalam berhubungan dengan negara adidaya di tengah persaingan geopolitik dan menggambarkan perubahan kepemimpinan dapat menghasilkan pergeseran kebijakan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas dinamika hubungan AS dan Filipina yaitu Mirza (2019), Rahman (2019), dan Castro (2020).

Mirza (2019) menyatakan bahwa opsi penurunan kerja sama tersebut tetap memberikan keuntungan bagi AS. Salah satunya adalah pengurangan biaya yang harus dikeluarkan untuk membantu militer Filipina. Namun, opsi ini tetap memiliki dampak negatif, yaitu berkurangnya pengaruh AS di Filipina. Meskipun demikian, dampak tersebut hanya bersifat jangka pendek (Mirza, 2019).

Kemudian Rahman (2019) menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Filipina di bawah pemerintahan Presiden Duterte mengalami restukturisasi, yang berfokus pada pengurangan dependensi

Filipina ke AS. Rahman menjelaskan bagaimana Duterte berusaha untuk mengakhiri ketergantungan ke negara AS dengan meningkatkan hubungan bilateral dengan Rusia dan Cina, terutama sebagai respons Filipina terhadap intervensi AS dalam kebijakan *war on drugs* yang diinisiasi oleh Duterte. Intervensi AS terhadap kebijakan kampanye *war on drugs* dan Laut Cina Selatan Filipina di bawah pemerintahan Duterte dianggap sebagai ancaman non-militer terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional Filipina (Rahman, 2019).

Selanjutnya Castro (2020) menyatakan bahwa hubungan keamanan antara Filipina dan AS mengalami krisis, yang memunculkan pertimbangan untuk mengganti aliansi formal menjadi kemitraan keamanan. Alasan diganti ke kemitraan keamanan adalah karena Duterte menganggap adanya ketidakpastian mengenai komitmen AS dalam membantu Filipina secara militer dalam permasalahan dengan Cina. Kemitraan keamanan tidak mengharuskan para pihak untuk saling membantu dalam konflik bersenjata (Castro, 2020). Sehingga jika Filipina mengalami ketegangan keamanan, AS tidak harus membantu negara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa hubungan Filipina dan AS mengalami ketegangan di era Duterte. Faktor-faktornya seperti ketidakpastian komitmen AS dalam konflik Laut Cina Selatan, intervensi AS dalam kebijakan domestik Filipina, dan usaha Duterte untuk mengurangi dependensi pada AS. Hal tersebut berkontribusi pada penurunan kerja sama keamanan Filipina dan AS. Namun, literatur yang ada belum membahas perubahan dinamika hubungan bilateral di era Marcos Jr. Oleh karena itu, penulis bermaksud menganalisis alasan menguatnya kembali kerja sama keamanan Filipina dan AS di era Marcos Jr. Penulis akan mengisi kesenjangan dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri dan keamanan Filipina yang terus berubah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “Mengapa Filipina di bawah kepemimpinan Marcos Jr. memilih untuk memperkuat kembali kerja sama keamanan dengan AS setelah hubungan keamanannya sempat menurun di era Duterte?” Penulis menggunakan Model Aktor Rasional dengan tujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi Marcos Jr. dalam proses pengambilan keputusan, terutama dengan dasar kepentingan nasional Filipina, yaitu keamanan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa data-data tertulis. Norman Denzin dan Yvonna Lincoln, menyatakan bahwa tradisi penelitian kualitatif mencakup berbagai pendekatan lintas disiplin ilmu sosial, termasuk observasi, analisis wacana, pendekatan historis, dan wawancara. Penelitian ini menekankan pemahaman mendalam tentang aktor dan fenomena dalam konteks alamiah mereka; fokus penelitian ini adalah apa yang dipikirkan oleh aktor dan partisipan sendiri. Liz Spencer juga menjelaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan sejarah seseorang dalam konteks tertentu. Metode penelitian ini biasanya dilakukan dengan metode semi-terstruktur, sensitif terhadap konteks, dan kaya akan data, dan penekanan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi makna dan alasan di balik pertanyaan yang diajukan (Bakry, 2015). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan mengacu pada proses mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, majalah, koran, dan artikel daring (Damping, 2020). Dalam metode ini,

peneliti berfokus pada sumber-sumber yang dianggap kredibel dan terpercaya untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai topik penelitian.

Kerangka Teoritis

Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan *Rational Actor Model* oleh Graham T. Allison sebagai kerangka pemikiran. Ada empat parameter dari model aktor rasional yaitu “*Goals and Objectives, Alternatives, Consequences, and Choices*” (Allison, 1969). Model aktor rasional menekankan pada asumsi bahwa keputusan didapatkan dari pertimbangan yang rasional dan memiliki tujuan yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam mengambil keputusan dengan langkah-langkah yang tersedia (Allison, 1969).

Mirza menjelaskan cara untuk dapat mengelaborasi lebih luas tentang sebuah aksi merupakan pilihan yang rasional, memerlukan empat komponen. (1) *goals and objectives*, (2) *alternatives*, (3) *consequences*, (4) *choice*. Dalam menganalisa komponen pertama, keamanan nasional dan kepentingan nasional menjadi faktor utama yang cukup penting untuk dipahami. Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional setiap negara bertujuan mengejar power yaitu faktor apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain (Mardiana, 2020). Faktor yang dimaksud adalah ekonomi, politik, keamanan, budaya dan teknologi. Namun penulis akan menekankan pada faktor keamanan. Komponen kedua adalah *options*. Negara wajib punya beberapa opsi yang dapat dijadikan solusi untuk permasalahan strategis yang dihadapi. Sehingga semakin banyak opsi, maka negara dapat memilih dengan tepat. Komponen ketiga adalah *consequences*. Dari opsi-opsi tersebut, pastinya menimbulkan konsekuensi yang berbeda-beda. Sehingga negara perlu untuk menganalisa dengan pertimbangan secara

cost and benefit dari opsi yang tersedia. Dalam analisis *cost* ada dua indikator yaitu, (1) *sensitivity*, (2) *vulnerability*. Perbedaannya dari kedua indikator ini ada pada rentang waktunya. *Sensitivity* merujuk kepada kerugian yang sifatnya cepat dan aksi yang dilakukan berakibat kepada aksi lainnya. Sedangkan *vulnerability* merujuk kepada kerugian yang dapat berakibat jangka panjang. Dalam analisis *benefit* ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu *positive sum*, *zero sum*, dan *negative sum*. Dalam pemahaman secara general, *positive sum* memberikan keuntungan kepada kedua aktor. *Zero sum* menganggap kerugian satu aktor merupakan keuntungan bagi aktor yang lain. *Negative sum* itu masing-masing aktor mengalami kerugian. Setelah analisis *cost and benefit* kemudian diurutkan yang mana opsi terbaik dan terburuk. Sehingga akan terlihat mana opsi yang dimungkinkan lebih baik dan sesuai dengan *strategic goals and objectives*. Komponen terakhir adalah pilihan. Setelah pertimbangan dari komponen pertama sampai ketiga, maka terakhir pemimpin negara dapat memilih pilihan yang rasional. Keempat komponen ini menjadi variabel yang akan penulis gunakan dalam pembahasan (Mirza, 2019).

Teori ini tepat diaplikasikan karena ada komponen-komponen yang harus dianalisis, mulai dari (1) *goals and objectives*, (2) *alternatives*, (3) *consequences*, (4) *choice*. Sehingga, penulis dapat menemukan alasan Marcos Jr. memperkuat kerja sama keamanan dengan AS secara jelas. Penulis mengaplikasikan teori ini dengan cara menemukan *goals and objectives*, kemudian mencari *alternatives* untuk mencapai *goals and objectives* tersebut dengan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap alternatif. Terakhir, penulis tinggal memilih *alternatives* yang paling cocok untuk mencapai *goals and objectives*.

Isu Prioritas Keamanan Filipina

Tantangan keamanan yang dihadapi Filipina mencakup banyak aspek mulai dari permasalahan domestik hingga permasalahan kawasan di Laut Cina Selatan. Permasalahan domestik, seperti masalah narkoba ilegal, tetap menjadi tantangan besar bagi Filipina. Di bawah pemerintahan Duterte, pendekatan keras dilakukan untuk memerangi pergerakan narkoba. Sementara itu, Marcos Jr. beralih ke pendekatan yang lebih moderat dalam menangani isu ini (Feng, 2024). Di sisi lain, Filipina menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatan di Laut Cina Selatan dengan Cina yang terus melakukan klaim wilayah dan membangun pangkalannya sendiri meskipun Filipina telah memenangkan sengketa di Pengadilan Arbitrase Internasional (Medina, 2017).

Dengan segala tantangan yang dihadapi oleh Marcos Jr., ia mengutamakan keamanan dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan terhadap tantangan keamanan domestik dan regional. Di tingkat regional tersebut, Filipina menyoroti pentingnya *ASEAN Centrality* sebagai landasan utama dalam mengelola isu keamanan di kawasan itu, dengan meningkatkan kerja sama pertahanan, terutama melalui *Mutual Defense Treaty* dengan AS dan kerja sama dengan mitra regional lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai kemampuan pertahanan yang kredibel, terutama dalam menghadapi tantangan di Laut Cina Selatan, wilayah strategis yang secara konsisten diklaim oleh Cina. *National Task Force–West Philippine Sea (NTF-WPS)* telah diidentifikasi sebagai salah satu prioritas kunci Filipina dalam menjaga kedaulatan maritimnya dengan kuat. Di tingkat lokal, Filipina berupaya memperkuat penegakan hukum untuk menghadapi ancaman kekerasan yang berasal dari kejahatan, konflik bersenjata, perdagangan narkoba ilegal, dan terorisme.

Pentingnya penegakan hukum yang mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional ditegaskan, dengan menciptakan keseimbangan antara keamanan dan perlindungan HAM (National Security Council, 2023).

Dalam kebijakan luar negeri Marcos Jr. terkait keamanan nasional, Filipina menghadapi tantangan serius di Laut Cina Selatan, dimana retorika Cina yang kontradiktif telah meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Menanggapi situasi ini, Marcos Jr. telah memulai inisiatif transparansi untuk mengungkap taktik zona abu-abu China di wilayah maritim Filipina di Laut Cina Selatan sejak Februari 2023. Kebijakan ini secara resmi disebut sebagai "*measured transparency*" dan telah mendapatkan dukungan dari negara-negara yang sependapat, serta memicu reaksi keras dari China. Tujuan utama dari inisiatif transparansi ini adalah untuk mendapatkan dukungan dan solidaritas internasional, meningkatkan kesadaran internasional tentang perilaku Cina di Laut Cina Selatan, dan membantah narasi Cina yang menyatakan negaranya baik dan bertanggung jawab (Ibarra, E. J. A., & Arugay, 2024). Selain menerapkan strategi transparansi, Marcos Jr. juga berupaya memperkuat kemampuan pertahanan negara melalui modernisasi militer. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan patroli maritim dan pembaruan armada laut, serta keterlibatan seluruh angkatan bersenjata (IP Defense Forum, 2024). Dengan mengintegrasikan inisiatif transparansi dan penguatan pertahanan, pemerintahan Marcos Jr. bertujuan untuk memastikan Filipina dapat menjaga kedaulatannya dan memelihara stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan.

Kemudian untuk memperkuat pertahanan, Marcos Jr. dalam salah satu pidatonya, menyatakan,

“My visit to the United States and more especially my meeting with President Joe Biden is essential to advancing our national interests and strengthening that very important alliance”

(INQUIRER.net, 2023).

Hal ini menegaskan pentingnya bagi AS untuk menunjukkan keandalannya sebagai sekutu yang dapat diandalkan untuk mencegah agresi Cina di kawasan tersebut. Lebih jauh lagi, strategi ini menyoroti kemampuan Marcos Jr. dalam menjaga keamanan nasional dengan meningkatkan kerja sama militer sambil memberikan kekuatan penyeimbang bagi Filipina terhadap tekanan Cina. Melalui perjanjian ini, Marcos Jr. berharap dapat mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan. Dalam kebijakan luar negerinya, kelihatan Marcos Jr. mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan situasi politik regional. Dengan memperkuat keamanan nasional, Presiden Marcos Jr. berharap dapat memastikan bahwa Filipina tetap menjadi negara yang kuat dan berdaulat.

Kalkulasi Rasional Marcos Jr. dalam Memperkuat Keamanan Nasional

Selama masa kepemimpinan Duterte, hubungan Filipina dan AS mengalami ketegangan karena kebijakan kontroversial Duterte, seperti *war on drugs* yang dinilai melanggar HAM. Sehingga, AS mengambil tindakan rasional dengan menurunkan tingkat kerja sama militer dengan Filipina, yang menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan tersebut dan menegaskan komitmen AS terhadap nilai-nilai HAM.

Karena kebijakan luar negeri Duterte yang menjauhkan Filipina dari AS, membuat Marcos Jr. harus merumuskan kembali arah hubungan Filipina dan AS. Marcos Jr. memiliki beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan secara rasional, dengan fokus pada *goals and objectives* Filipina. Pertama, Filipina dapat memutuskan kerja sama militer dengan AS, yang berarti meneruskan arah kebijakan Duterte yang lebih independen. Kedua, Filipina dapat memperkuat kerja sama militer dengan AS, yang menandai adanya pergeseran kebijakan dari era Duterte. Ketiga, Filipina dapat mengurangi kerja sama militer dengan AS, sebagai pendekatan moderat untuk menyeimbangkan hubungan Filipina dengan AS dan Cina. Cina harus dipertimbangkan karena Cina merupakan mitra ekonomi terkuat Filipina sekaligus musuh di Laut Cina Selatan.

Setiap opsi memiliki konsekuensi dan peluang sendiri. Memutuskan kerja sama militer dengan AS dapat menegaskan kedaulatan Filipina tetapi berisiko melemahkan posisi pertahanan. Karena Filipina masih bergantung dengan AS dalam hal bantuan militer. Memperkuat kerja sama dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan, dimana AS semakin membantu Filipina dalam sektor militer dan keamanan wilayah serta teritorial, namun mungkin memicu reaksi negatif dari Cina. Kemudian, mengurangi kerja sama merupakan upaya penyeimbangan, tetapi berisiko melemahkan posisi Filipina di Laut Cina Selatan dan semakin memperkeruh hubungan tradisionalnya dengan AS. Dalam mempertimbangkan semua opsi tersebut, Marcos Jr. harus memutuskan secara hati-hati dan tindakan yang rasional, karena keputusan yang diambil akan memiliki implikasi jangka panjang tidak hanya bagi hubungan Filipina dan AS.

Pada opsi yang pertama, Filipina dapat mempertimbangkan untuk memutuskan kerja sama militer dengan AS. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Filipina terhadap kekuatan asing dan memperkuat independen negara, yang sesuai dengan slogan “*independent foreign policy*” yang dicanangkan oleh Duterte dan dilanjutkan oleh Marcos Jr (Gill, 2023). Tujuan utama dari opsi ini adalah menegaskan kedaulatan Filipina dalam politik luar negeri, dan meredakan ketegangan dengan Cina yang selama ini merasa terancam dengan kehadiran militer AS di kawasan Laut Cina Selatan, serta mencari keseimbangan baru dalam hubungan internasional Filipina. Namun, risiko dari opsi ini sangat besar. Jika dilihat dari segi keamanan, tanpa dukungan militer AS, kapabilitas pertahanan Filipina terhadap ancaman eksternal, terutama di Laut Cina Selatan, akan melemah secara cepat.

Pada tahun 2011, AS juga membantu *Armed Forces of the Philippines* dalam penambahan peralatan dan peningkatan tentara Filipina seperti aktivitas pelatihan militer serta bantuan teknis, yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan tentara Filipina dalam pemberantasan terorisme dan menyerang pemberontakan domestik (Oktavianor & S., 2024). Jika Marcos Jr. memilih opsi ini, maka Filipina akan kehilangan akses ke teknologi pertahanan canggih dan pelatihan militer yang selama ini disediakan oleh AS. Kekosongan kekuatan yang ditinggalkan AS juga bisa dimanfaatkan oleh Cina untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Sehingga, tidak ada lagi negara yang bisa menyeimbangi Cina, dan kemungkinan negara-negara di kawasan akan lebih rentan terhadap pengaruh dari Cina. Tanpa dukungan dari AS, keamanan nasional Filipina terutama di kawasan Laut Cina Selatan akan berada dalam ancaman. Filipina mungkin mengalami kesulitan

untuk mempertahankan klaim atas Scarborough Shoal dan Second Thomas Shoal serta tekanan dari Cina jika kerja sama militer dengan AS berakhir. Ketika *Mutual Defense Treaty 1951* yang telah menjadi dasar kerja sama pertahanan Filipina dan AS selama lebih dari tujuh dekade berakhir, Filipina akan kehilangan jaminan keamanan dari AS, sehingga membuat posisi strategisnya menjadi sangat rentan. Kemudian AS juga akan kehilangan mitranya di Asia Tenggara yang dibangun sejak lama, dan posisi strategis AS di Asia Tenggara akan berkurang. Oleh karena itu, keputusan untuk mengakhiri kerja sama militer dengan AS harus dipertimbangkan secara matang dan rasional, karena risikonya dapat membahayakan kepentingan nasional Filipina dalam jangka panjang dan merugikan kedua negara. Meskipun ada benefit yang didapatkan, seperti kemandirian dan meredakan ketegangan dengan Cina, namun konsekuensi dari opsi ini lebih berat daripada manfaat yang diharapkan.

Pada opsi yang kedua, memperkuat kerja sama militer dengan AS dapat memberikan keuntungan strategis bagi Filipina, karena peningkatan kerja sama akan memberikan akses lebih besar terhadap teknologi militer, pelatihan dan intelijen dari AS, yang memperkuat kemampuan pertahanan negara secara signifikan. Selain itu, kerja sama militer yang lebih erat juga akan meningkatkan kapasitas Filipina dalam menghadapi ancaman eksternal, khususnya dari Cina di Laut Cina Selatan, dengan memastikan kehadiran militer AS yang dapat bertindak sebagai penyeimbang kekuatan di kawasan tersebut. Sehingga, keberadaan AS sebagai sekutu yang siap memberikan bantuan militer yang membuat posisi Filipina semakin kuat. Hal tersebut menciptakan *deterrence* bagi negara lain yang mungkin berniat menyerang atau menekan Filipina

secara militer. Bantuan yang diberikan oleh AS sebesar 500 juta USD pada bulan Juli 2024 melalui program *Foreign Military Financing* bisa membantu Filipina untuk memodernisasi militernya tanpa membebani anggaran nasional Filipina. Hal tersebut merupakan yang paling dibutuhkan oleh Filipina dan sesuai dengan kepentingan nasionalnya serta membuktikan bahwa Filipina tidak sendirian dalam menghadapi ancaman militer eksternal (VOA, 2024). Akan tetapi, ada *cost* dalam peningkatan hubungan ini, seperti peningkatan ketegangan dengan Cina. Namun, hal ini dapat dikelola dengan baik melalui *soft diplomacy* dan pendekatan yang seimbang, dimana Filipina terus menjalin hubungan ekonomi dengan Cina sambil memperkuat aliansi militer dengan AS. Secara tidak langsung, hal ini dapat menguntungkan Filipina dalam sektor ekonomi dari Cina, dan militer dari AS. Sehingga *cost* ini hanya mengganggu keamanan nasional Filipina dalam jangka pendek (*sensitivity*). Jika dilihat dari *benefit*, maka kategorinya masuk pada *positive sum* dimana Filipina dan AS sama-sama merasakan keuntungan. Filipina mendapatkan banyak *benefit* dari AS, dan AS dapat meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara.

Kerja sama *Enhanced Defence Cooperation Agreement (EDCA)* yang dibentuk pada tahun 2014 saat Obama berkunjung ke Filipina, tidak berjalan selama pemerintahan Duterte. Namun, pada era Marcos Jr., hubungan AS dan Filipina membaik dan mulai menghidupkan kembali EDCA, sehingga Marcos Jr. menambahkan empat pangkalan militer, yaitu Lal-lo Bandara di Cagayan, Pangkalan Angkatan Laut Camilo Osias di Cagayan, Camp Melchor Dela Cruz di Isabela, dan Pulau Balabac di Palawan (Chang, 2023). Saat ini total pangkalan militer berjumlah sembilan, sehingga akan lebih memperkuat pertahanan Filipina dan

memberikan benefit lain seperti peningkatan peluang investasi dan lapangan kerja (Yoakley, 2023). Marcos Jr. tampaknya telah melakukan kalkulasi rasional bahwa *benefit* peningkatan kerja sama dengan AS jauh lebih besar dibandingkan *cost* yang harus ditanggung Filipina. Menurut penulis, kalkulasi rasional Marcos Jr. ditunjukkan dengan ketimpangan kekuatan militer yang besar, dimana Filipina lebih lemah disbanding Cina. Menurut data terbaru dari *Global Fire Power (GFP)* pada tahun 2024, kekuatan militer Cina menempati peringkat ke-3 dunia, sedangkan kekuatan militer Filipina menduduki ranking 34 (Global Fire Power, 2024).

Cina memiliki keunggulan yang jauh lebih besar dalam hal kekuatan udara, darat, dan laut dibandingkan Filipina. Mengingat ketimpangan kekuatan militer yang cukup besar ini, Filipina membutuhkan bantuan militer dari AS sebagai sekutu utamanya untuk mengimbangi kekuatan Cina di Kawasan Asia Tenggara, terlebih lagi dalam sengketa Laut Cina Selatan yang belum terselesaikan. Secara keseluruhan, memperkuat kerja sama militer dengan AS memiliki *benefit* yang sangat besar dan *cost* yang kecil bagi Filipina.

Pada opsi yang ketiga, mengurangi kerja sama militer dengan AS dapat menjadi langkah yang kurang menguntungkan bagi Filipina dalam jangka panjang. Meskipun bertujuan untuk meredakan ketegangan dengan Cina, langkah ini membawa risiko besar terhadap kepentingan nasional Filipina. Konsep *realism* dalam hubungan internasional, sebagaimana dijelaskan oleh Morgenthau, menekankan bahwa negara harus mengutamakan kepentingan nasional dan keamanan untuk mempertahankan kedaulatannya di tengah anarki politik internasional. Dalam artian, keputusan

Filipina untuk menurunkan kerja sama dengan AS dengan tujuan meredakan ketegangan dengan Cina dapat dilihat sebagai opsi yang mengorbankan kepentingan nasional untuk menghindari konfrontasi yang lebih besar. Oleh karena itu, penulis menganggap opsi ini kurang tepat dalam jangka panjang untuk kepentingan nasional Filipina. Mengurangi kerja sama militer dengan AS dapat mengganggu upaya modernisasi militer dan mereduksi kemampuan pertahanan. Jika dilihat dari sisi *cost*, pilihan ini dapat meningkatkan kerentanan Filipina dalam berbagai aspek, termasuk militernya, karena selama ini AS yang selalu membantu militer Filipina agar lebih kuat. Sementara dari segi *benefit*, keuntungan dalam meredakan ketegangan dengan Cina tidak sebanding dengan kerugian yang timbul akibat berkurangnya dukungan dari AS (*zero sum*). AS dapat mencari aliansi lain agar tetap mempertahankan pengaruh mereka di Asia, walaupun AS kehilangan beberapa keuntungan strategis dari Filipina.

Berikut tabel pengurutan opsi yang terbaik atau paling maksimum hasilnya hingga yang paling minimum.

No.	Opsi	Cost	Benefit	Hasil
1.	Opsi II	Sensitivity	Positive Sum	Maksimum
2.	Opsi III	Vulnerability	Zero Sum	Sedang
3.	Opsi I	Vulnerability	Negative Sum	Minimum

Tabel 1: Opsi Kebijakan dan Analisis Cost dan Benefit untuk Filipina dalam Kerja Sama dengan AS. Sumber: Analisis Penulis (2024)

Komponen terakhir dalam analisis ini adalah komponen aksi. Jika dilihat dari tabel di atas hasil yang paling maksimum adalah opsi kedua, yaitu peningkatan kerja sama militer dengan AS. Sebagai aktor rasional yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan nasional

Filipina, Marcos Jr. memilih untuk mengimplementasikan opsi ini. Dengan meningkatkan kerja sama militer dengan AS, Filipina dapat memperkuat posisinya di kawasan, terutama dalam menghadapi tantangan di kawasan Laut Cina Selatan. Langkah ini juga sejalan dengan “*measured transparency*” yang telah dijalankan Marcos Jr., dimana dukungan kuat dari sekutu seperti AS dapat meningkatkan efektivitas strategi ini.

Peningkatan kerja sama militer dapat mencakup beberapa aspek penting, seperti; (1) modernisasi angkatan bersenjata Filipina melalui transfer teknologi dan pelatihan dari AS, (2) peningkatan frekuensi dan skala latihan militer bersama, (3) penguatan kemampuan pengawasan maritim dan pertahanan pesisir, (4) akses yang lebih luas ke intelijen dan dukungan logistik AS.

Implementasi opsi ini juga mempertimbangkan potensi reaksi dari Cina. Meskipun mungkin ada peningkatan ketegangan jangka pendek, strategi ini bertujuan untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat bagi Filipina dalam interaksinya dengan Cina. Dengan dukungan AS yang lebih kuat, Filipina dapat menjalankan diplomasi yang lebih tegas dan efektif terkait sengketa Laut Cina Selatan. Marcos Jr. juga menyeimbangkan dua kekuatan di Asia tersebut, yaitu hubungan militer dengan AS, dan hubungan ekonomi dengan Cina, sehingga tidak memicu eskalasi konflik yang tidak perlu.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Filipina memperkuat kembali kerja sama keamanan dengan AS di era Marcos Jr. karena pertimbangan kepentingan nasional, yaitu keamanan nasional, dan potensi peningkatan posisi

strategis Filipina di kawasan. Keputusan ini diambil dengan analisis rasional, meskipun ada risiko peningkatan ketegangan jangka pendek dengan Cina. Strategi ini bertujuan memperkuat posisi Filipina di kawasan, dan meningkatkan nilai strategis negara dalam dinamika regional. Secara teoritik tulisan ini diharapkan bisa memperluas perspektif pembahasan fenomena dinamika aliansi terutama Filipina dan AS dengan menggunakan model aktor rasional. Dalam tulisan ini penulis memilih aktor rasional dari sisi Filipina. Penulis menyarankan untuk tulisan selanjutnya membahas aliansi Filipina dan AS menggunakan pilihan aktor rasional dari negara AS dibawah kepemimpinan Joe Biden atau kepemimpinan AS selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Advincula-lopez, L. V. (2022). Challenges and Gains in Military Relations between the Philippines and the United States. *EAST-WEST CENTER*, 586.
- Allison, G. T. (1969). CONCEPTUAL MODELS AND THE CUBAN MISSILE CRISIS. *The American Political Science Review*, 63(3), 689–718.
- Bakry, U. S. (2015). *METODE PENELITIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL*. PUSTAKA PELAJAR.
- Castro, R. C. D. (2020). Abstract of crisis in Philippine-U.S. security relations: from an alliance to a security partnership? *Pacific Review*, 35(3), 477–505. <https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1845227>
- Chang, F. K. (2023). *US-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement Revived*. Foreign Policy Research Institute.
- Damping, G. (2020). Perubahan Kebijakan Luar Negeri Filipina Terhadap China di Bawah Kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap China dalam Konflik Laut China Selatan. *Journal of International Relations*, 6(4), 619–628.
- Feng, E. (2024). *President Marcos Jr. hasn't put an end to killings in the Philippines' drug war*. NPR.
- Gill, D. M. (2023). Navigating Contemporary Philippine Foreign Policy Under Marcos Jr. *Observer Research Foundation*, 645.
- Global Fire Power. (2024). *Comparison of China and Philippines Military Strengths (2024)*.
- Ibarra, E. J. A., & Arugay, A. A. (2024). *Something Old, Something New: The Philippines' Transparency Initiative in the South China Sea*. 27, 1–10.
- INQUIRER.net. (2023). *Bongbong Marcos: Meeting with Biden to advance national interest, solidify alliance with US*.
- IP Defense Forum. (2024). *Philippines boosting maritime security, diplomacy to deter South China Sea assaults*.
- Mardiana, V. (2020). Krisis Doklam dan Kepentingan Nasional India. *Review of International Relations*, 2(2), 91–102. <https://doi.org/10.24252/rir.v2i2.17966>
- Medina, C. P. (2017). *Legal Victory for the Philippines against China: A Case Study*. GENEVA GRADUATE INSTITUTE.
- Mirza, F. I. (2019). *DINAMIKA ALIANSI AMERIKA SERIKAT – FILIPINA : PENURUNAN KERJASAMA MILITER AMERIKA SERIKAT SEBAGAI TINDAKAN RASIONAL (2016-2018)*. 2(2), 19–32.
- National Security Council. (2023). *NATIONAL SECURITY POLICY 2023-2028*. In *National Security Council*.
- Oktavianor, T., & S., S. M. N. A. (2024). Tantangan Keamanan dan Strategi Adaptif Filipina dalam Rivalitas Amerika Serikat dan Cina di Kawasan Asia - Pasifik. *Journal of International Studies*, 8(2), 474–494. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n2.5>
- Rahman, D. F. (2019). *RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI FILIPINA: UPAYA PRESIDEN RODRIGO DUTERTE UNTUK MENGAKHIRI DEPENDENSI KE AMERIKA SERIKAT*. *Journal of International Relations*, 5(1), 694.
- Setiawan, N. A., Sunarko, B. S., & Hara, A. E. (2021). Keputusan Filipina Membuka

Kembali Pangkalan Militer Amerika Serikat Melalui Perjanjian Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) Tahun 2014. *Jurnal E-Sospol*, 8(1), 23–30.

U.S. EMBASSY IN THE PHILIPPINES. (2024). *Joint Statement on the Philippines-United States Bilateral Strategic Dialogue*.

VOA. (2024). *US announces \$500 million in military financing for Philippines*.

Yoakley, L. C. W. D. (2023). *Beneath The Surface: China's Subtle, Tightening Grip On Filipino Affairs*. UNITED STATES AIR FORCE.